
Laporan Pengelolaan & Pelayanan Informasi Publik

Analisis Kinerja dan Kepatuhan Pelayanan PPID — Periode Tahun 2025 s.d. Maret 2026



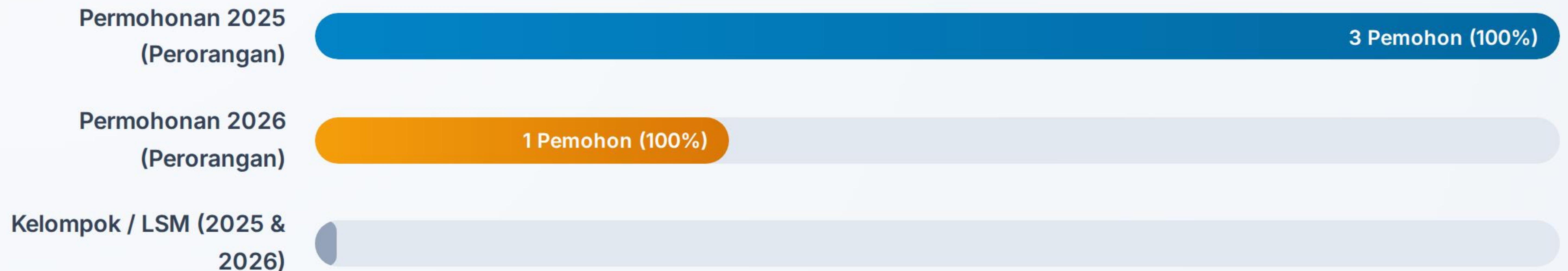
Bagian I: Analisis Kuantitatif

Ikhtisar permohonan informasi masuk, profil pemohon, serta indikator kinerja pelayanan waktu tanggap.

Komparasi Data Publik 2025 – 2026

Indikator Pelayanan	Tahun 2025 (Jan - Des)	Tahun 2026 (Jan - Mar)
Jumlah Permohonan Masuk	3 Pemohon	1 Pemohon
Waktu Pemenuhan Layanan	✔ < 10 Hari Kerja	✔ < 10 Hari Kerja
Status Penyelesaian Berkas	3 Dikabulkan	1 Dipenuhi
Profil Pemohon (Perorangan)	3 Pemohon (100%)	1 Pemohon (100%)
Profil Pemohon (LSM / Kelompok)	0 Pemohon (0%)	0 Pemohon (0%)

Volume & Profil Pemohon Informasi



i Analisis Demografis: Aktivitas permohonan informasi publik sepenuhnya didominasi oleh perorangan (100%). Belum ada partisipasi kolektif dari institusi, kelompok masyarakat sipil, maupun LSM pada kedua periode pelaporan.



Bagian II: Regulasi & Penolakan

Landasan hukum penolakan informasi demi melindungi hak privasi dan mematuhi regulasi keamanan data kepemiluan.

Analisis Alasan Penolakan Informasi

Periode Laporan 2025

Penolakan didasarkan pada perlindungan data rahasia pribadi yang tidak boleh diakses oleh publik secara bebas.

 Per KPU No. 22/2023 (Pasal 18 ayat 2 huruf d & ayat 5 huruf e)

Periode Laporan 2026

Penolakan terhadap permintaan salinan DPT karena kewenangan akses berada di pihak khusus tingkat wilayah.

 Distribusi DPT Dibatasi pada KPU, Bawaslu, & Tim Paslon Terbatas